



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

INTER-PARLIAMENTARY UNION



LAPORAN DELEGASI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

THE ASSOCIATION OF SECRETARIES GENERAL OF PARLIAMENTS (ASGP) JENEWA - SWISS 24-26 MARET 2024



**BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**



LAPORAN DELEGASI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI MENGHADIRI SIDANG THE ASSOCIATION OF SECRETARIES GENERAL OF PARLIAMENTS (ASGP) TANGGAL 24-26 MARET 2023, DI JENEWA - SWISS

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sidang The Association of Secretaries General of Parliaments (ASGP) telah berlangsung dari tanggal 24 sampai dengan 26 Maret 2024 di Jenewa Swiss. Rangkaian Sidang ASGP diawali dengan pembahasan mengenai agenda sidang, pembahasan Tema yang telah ditentukan, pelaksanaan Debat Umum, Pemilihan 1 anggota Komite Eksekutif, dan pembahasan agenda sidang selanjutnya.

B. Dasar Pengiriman dan Susunan Delegasi Sekretariat Jenderal DPR RI

Pengiriman Delegasi Sekretariat Jenderal menghadiri Sidang ASGP berdasarkan pada undangan dari Presiden ASGP Najib El-Khaldi pada tanggal 12 Desember 2023.



C. Susunan Delegasi Sekretariat Jenderal DPR RI

Berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Jenderal Nomor : 185/DP/03/2024 tanggal 19 Maret 2024, susunan Delegasi ASGP Setjen DPR RI sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1.	Suprihartini, S.IP. M.Si	Deputi Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal DPRRI/Ketua Delegasi
2.	Rudi Rohmansyah, S.H., M.H.	Kepala Biro Umum /AnggotaDelegasi
3.	Haryanti, S.AB.,M.AP	Kepala Sub bagian Fasilitas Kegiatan Luar Negeri Anggota/Sekretaris Delegasi
4.	Marfuatul Latifah, S.HI., L.LM	Analisis Legislatif Ahli Madya/ Anggota Delegasi



D. Tujuan dan Manfaat

Pertemuan ASGP membahas beberapa topik terkini yang berkaitan dengan tugas dan fungsi sekretariat dalam memberikan dukungan terhadap parlemen. Pertemuan ini juga bertujuan untuk mendiskusikan berbagai permasalahan bersama yang dihadapi oleh Sekretariat parlemen. Diskusi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja dukungan sekretariat jenderal terhadap penyelenggaraan tugas parlemen. Pertemuan ini diharapkan menjadi ajang bertukar pengalaman dan saling memberikan masukan.

Hal ini sangat bermanfaat bagi Sekretariat Jenderal DPR RI, selain mengetahui sistem kesekretarian parlemen di negara-negara lain, juga dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang praktik-praktik terbaik yang dilakukan oleh sekretariat parlemen. Meskipun terdapat perbedaan sistem parlemen, diskusi terkait dengan topik yang dihadapi oleh kesekretarian parlemen negara lain dapat memberikan masukan yang berharga bagi Setjen DPR RI dalam upaya meningkatkan dukungan, baik teknis administratif maupun substantif. Pengetahuan dan wawasan yang didapat delegasi akan sangat berguna untuk sebagai benchmarking untuk perbaikan dan peningkatan pelaksanaan dukungan terhadap DPR RI kedepan. Dengan menghadiri Pertemuan ASGP juga dimanfaatkan untuk membangun jaringan komunikasi dengan sekretariat parlemen negara-negara lain.



II. PELAKSANAAN SIDANG

A. SIDANG HARI PERTAMA

Minggu 24 Maret 2024

Kegiatan pertama yang dilakukan adalah Sesi Pembukaan yang dipimpin oleh Mr Najib El Khaldi selaku Presiden ASGP. Pimpinan Sidang menawarkan urutan kegiatan sepanjang penyelenggaraan sidang dan meminta persetujuan seluruh peserta sidang. Sidang dilanjutkan dengan memperkenalkan 30 Anggota Baru ASGP, Deputi Persidangan Sekretaris Jenderal Ms Suprihartanti merupakan salah satu Anggota ASGP yang diperkenalkan dalam sesi tersebut. Sesi Pembukaan ditutup dengan pengumuman terkait pemilihan anggota Komite Eksekutif ASGP.

Terdapat 3 sesi lain pada hari pertama Sidang ASGP. Sesi yang dimaksud adalah:

- Pembahasan tema tentang “In the news and innovations at Parliament”,
- Penyelenggaraan Debat Umum tentang “Keeping the permanent record of debates in parliament: what are the tools of today and tomorrow?”, dan
- Pembahasan Tema tentang “The attendance of Ministers of State to Parliament, to report and give explanations about their management of government business”.



THEME: IN THE NEWS AND INNOVATIONS AT PARLIAMENT

Sesi ini dipimpin langsung oleh Mr Najib El Khaldi, Presiden ASGP Pada sesi pembahasan tema “In the news and innovations at Parliament”, terdapat 3 Anggota yang menyampaikan pernyataan resmi (communication). Setiap pembicara menyampaikan inovasi yang berhasil dicapai oleh masing-masing parlemen dengan harapan dapat berbagi praktik terbaik dan mendapatkan masukan dari parlemen lain.

a. Mr. Talip Uzun, Sekretaris Jenderal Majelis Nasional Agung Türkiye

Mr. Uzun menyampaikan communication (pernyataan resmi) berjudul “Environment Friendly Procedures in the Parliament” (Prosedur Ramah Lingkungan di Parlemen Turki) yang mengulas tentang upaya dan prosedur yang diterapkan oleh Parlemen Turki untuk mempromosikan praktik ramah lingkungan. Selama 2 (dua) dekade terakhir telah terjadi perubahan signifikan dalam pengelolaan administrasi publik di Turki. Perubahan tersebut dicanangkan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar melalui pendekatan berkelanjutan dengan menggunakan teknologi inovatif untuk mendukung transformasi hijau.

Inisiasi tersebut dituangkan berdasarkan keikutsertaan Turki dalam Paris Agreement. Inovasi juga dilakukan untuk mencapai tujuan menjaga peningkatan suhu global di bawah 2°C setelah 2020, yang hanya bisa dicapai jika kebijakan-kebijakan ini diterapkan oleh semua pihak. Kebijakan yang dimaksud mencakup pengaturan terkait energi terbarukan, daur ulang, kesadaran lingkungan, dan kebiasaan produksi dan konsumsi yang ramah lingkungan.



Langkah nyata yang telah dilakukan oleh Parlemen Turki antara lain:

- Menempatkan wilayah perkantoran Majelis Nasional Agung Türkiye di pusat dengan area terbuka dan tertutup.
- Membangun Instalasi panel surya di atap perkantoran Majelis Nasional Agung Türkiye untuk menghasilkan listrik berdasarkan rezim energi terbarukan
- Mendorong pembangunan panel surya di atap restoran, dengan target akan memenuhi 36% kebutuhan listrik tahunan dan mengurangi jejak karbon sebesar 278 ton setiap tahun.
- Mendorong seluruh anggota parlemen dan pegawai kesekretariatan untuk menggunakan kendaraan merek TOGG dan kendaraan listrik untuk layanan transportasi bagi seluruh , berkontribusi pada emisi karbon yang lebih rendah serta pengurangan polusi udara dan suara.
- Mengesahkan sistem Sistem Air Panas Surya melalui kebijakan transisi ke sistem kolektor surya untuk air panas di gedung layanan perkantoran Majelis Nasional Agung Türkiye. Sistem ini diharapkan menghemat 21.000 meter kubik gas alam setiap tahun.
- Memastikan keberlanjutan sistem Otomasi Bangunan di wilayah perkantoran Majelis Nasional Agung Türkiye. Sistem tersebut berupa perangkat pengendalian jarak jauh dalam konsumsi energi sejak 1998, hal tersebut memastikan penggunaan daya listrik yang efisien.
- Penggantian pencahayaan eksterior di wilayah perkantoran Majelis Nasional Agung Türkiye dengan peralatan LED hemat energi, hal tersebut berhasil menghemat energi tahunan sebesar 50%.
- Menerapkan Manajemen Lingkungan dan Inisiatif Nol Limbah. Proyek ini diluncurkan pada tahun 2017 di bawah naungan Ibu Negara Emine Erdoğan, mempromosikan efisiensi sumber daya dan kebiasaan berkelanjutan. Selain itu diberikan pelatihan manajemen limbah bagi seluruh penghuni perkantoran Majelis Nasional Agung Türkiye.
- Menginisiasi program “Parlemen Bebas Kertas” melalui pengurangan jumlah laporan komisi yang dicetak, menyediakan akses digital ke dokumen, dan menghemat 17,6 juta lembar kertas.



Seluruh kebijakan dan program tersebut telah diakui sebagai gerakan ramah lingkungan terbesar di Turki, yang telah mendapatkan penghargaan "Sustainable Development Goals Action Award" oleh UNDP pada tahun 2021. Parlemen Turki didukung oleh Kesekretariatan Parlemen mengupayakan keberlanjutan kebijakan dan program tersebut untuk meminimalisir dampak kerusakan lingkungan dan memastikan dunia yang layak huni bagi generasi mendatang, menekankan pentingnya penggunaan sumber daya alam yang efektif dan efisien.

Inisiatif yang diambil oleh Parlemen Turki menunjukkan pendekatan komprehensif terhadap keberlanjutan lingkungan, menunjukkan kemajuan signifikan dalam efisiensi energi, manajemen limbah, dan promosi teknologi hijau. Upaya ini bertujuan untuk berkontribusi pada tujuan lingkungan global dan menjadi model bagi lembaga dan negara lain untuk diikuti. Upaya ini dapat dilakukan oleh parlemen negara lain. Sekretariat Jenderal Parlemen perlu menyarankan upaya-upaya untuk mewujudkan gerakan ramah lingkungan.

b. Dr-Enkhbat-Damdin, Sekretaris Jenderal State Great Khural Mongolia

Dr. Damdin menyampaikan communication (pernyataan resmi) berjudul "Parliamentary Self- Assessment on Human Rights and Gender Issues" yang menceritakan pengalaman Parlemen Mongolia dalam menjalankan penilaian mandiri mengenai isu hak asasi manusia dan gender. Pelaksanaan penilaian mandiri ini penting sebab Mongolia memulai reformasi sistematis untuk memperkuat demokrasi dan tata kelola parlementer melalui amandemen konstitusi pada tahun 2019 dan 2023. Amandemen konstitusi tersebut, berhasil meningkatkan kapasitas representatif Parlemen Mongolia dan menambah jumlah kursi parlemen dari 76 menjadi 126.



Pada Agustus 2022, Parlemen Mongolia menandatangani Memorandum kerjasama dengan IPU untuk memperkuat jaminan dan perlindungan hak asasi manusia serta kesetaraan gender. Penilaian mandiri ini dilakukan dengan dukungan dari *Swiss Agency for Development and Cooperation*.

Penilaian mandiri difokuskan pada dua isu utama: hak asasi manusia dan kesetaraan gender, dengan tujuan mengidentifikasi situasi, masalah mendesak, dan tantangan dalam implementasi kebijakan dan aktivitas terkait di parlemen dan sekretariatnya serta menentukan solusi potensial. Penilaian mandiri terdiri dari 3 fase utama: persiapan, penilaian, dan pasca-penilaian

Sekretariat Parlemen Mongolia dengan serius mempertimbangkan tindak lanjut atas rekomendasi yang disebutkan dalam laporan. Kerjasama antar pemangku kepentingan sangat penting untuk mengimplementasikan rekomendasi tersebut.

Parlemen Mongolia berencana untuk memasukkan hasil dan rekomendasi penilaian mandiri ke dalam rencana strategis baru untuk periode 2024-2028. Penilaian mandiri ini merupakan inisiatif penting yang menandai langkah maju dalam perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan gender di Mongolia. Kerjasama dengan IPU dan organisasi internasional lainnya memainkan peran kunci dalam kesuksesan inisiatif ini, dan Parlemen Mongolia berkomitmen untuk melanjutkan kerjasama ini di masa depan.

c. Mr. Aleksandar Klarić, Sekretaris Jenderal Parlemen Montenegro

Mr. Klarić menyampaikan communication (pernyataan resmi) berjudul "*Challenges and Advantages for Small Countries*" inovasi dan modernisasi di parlemen Montenegro serta tantangan dan keuntungan yang dihadapi oleh negara-negara kecil.



Parlemen dari negara kecil seperti Montenegro menjalankan kegiatannya dalam ruang lingkup yang lebih terbatas dibandingkan dengan parlemen besar. Keadaan ini mendorong Parlemen Montenegro mengadopsi pendekatan inovatif dalam tata kelola dan manajemen sumber daya. Inovasi yang dimaksud adalah Digitalisasi Proses Legislasi, Transparansi dan Keterbukaan, Partisipasi Masyarakat dan Generasi Muda, dan Praktik Berkelanjutan dan Tantangan Lingkungan.

Digitalisasi Proses Legislasi, diwujudkan melalui penyelenggaraan sistem e-Parlemen. Sistem tersebut diperkenalkan untuk mendukung proses legislatif secara elektronik, dari penerimaan materi hingga pengesahan sampai dengan publikasi. Parlemen Montenegro melakukan instalasi unit multimedia digital di Ruang Sidang Pleno dan peralatan konferensi canggih di semua ruang komite. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kerja dan keterlibatan publik. Untuk melengkapi itu semua, Parlemen Montenegro meluncurkan portal e-petisi, yang memungkinkan warga untuk mengajukan inisiatif legislatif dan bertanya langsung kepada pembuat undang-undang.

Parlemen Montenegro memastikan transparansi dan keterbukaan dalam pelaksanaan tugas parlemen. Inisiasi tersebut dilakukan dengan kesadaran bahwa transparansi dan keterbukaan adalah prinsip fundamental yang membimbing reformasi parlemen. Upaya untuk mewujudkan transparansi dan keterbukaan dilakukan melalui penggunaan akun media sosial resmi dan situs web parlemen dengan akses ke dataset terbuka untuk meningkatkan keterlibatan dan transparansi. Saat ini, Parlemen Montenegro merupakan parlemen yang paling transparan di wilayahnya, hal tersebut diakui oleh Komisi Eropa.



Tidak hanya menjamin transparansi dan keterbukaan bagi seluruh warga masyarakat, Parlemen Montenegro juga berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dan generasi muda. Generasi muda merupakan pilar keberlanjutan demokrasi, oleh karena itu generasi muda merupakan target yang menjanjikan dalam pendidikan demokrasi dan pemberdayaan di masa yang akan datang. Hal tersebut diwujudkan melalui program seperti Lokakarya Demokrasi untuk anak sekolah dasar dan Simulasi Parlemen untuk siswa sekolah menengah untuk mengedukasi dan memberdayakan pemimpin masa depan.

Parlemen Montenegro mendapatkan keuntungan dari kondisinya sebagai parlemen kecil, hal tersebut adalah fleksibilitas dan kemampuan untuk bertindak cepat tanpa birokrasi yang rumit. Namun di sisi lain tantangan utama yang selalu menjadi kendala adalah keterbatasan sumber daya, yang menekankan pentingnya kemitraan eksternal dan dukungan untuk mewujudkan rencana ambisius. Berdasarkan kondisi tersebut, Parlemen Montenegro telah mencapai banyak hal dalam waktu singkat tiga tahun, menunjukkan keuntungan dari parlemen kecil dalam hal kelincahan dan fleksibilitas.

Parlemen Montenegro menyatakan kunci sukses dalam pelaksanaan tugasnya adalah kolaborasi dan berbagi pengalaman dengan mitra eksternal sangat berharga dalam perjalanan menuju pertumbuhan dan perbaikan. Sidang ini merupakan momentum yang sangat tepat bagi setiap anggota untuk berbagi pengalaman terbaik dalam pelaksanaan tugas dukungan keparlemenan. Momentum ini dapat menjadi sarana menjalin komunikasi untuk memperkuat langkah bersama mewujudkan parlemen yang lebih baik di masa yang akan datang.



Ketiga pembicara dalam pembahasan tema *in the news and innovation* menyampaikan inovasi yang berhasil diterapkan di parlemen masing-masing, menunjukkan bahwa teknologi dan pendekatan baru dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keterlibatan publik dalam proses legislatif. Inovasi-inovasi ini dapat diadopsi oleh parlemen lain untuk meningkatkan tata kelola dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, perlu digarisbawahi bahwa kerja sama internasional merupakan kunci keberhasilan dalam mewujudkan salah beberapa tujuan pendirian asosiasi ini, yaitu mengusulkan langkah-langkah untuk meningkatkan metode kerja berbagai Parlemen dan memastikan terwujudnya kerja sama antara layanan berbagai Parlemen.



GENERAL DEBATE : KEEPING THE PERMANENT RECORD OF DEBATES IN PARLIAMENT: WHAT ARE THE TOOLS OF TODAY AND TOMORROW?

Sesi ini dimoderatori oleh Mr Georg Kleeman, Wakil Sekretaris Jenderal Bundesrat, Jerman.

Pertanyaan pemantik yang dihadirkan

- What tools does you use to record the permanent proceedings of parliament (handwritten notes, audio recording, video recording, AI)?
- How, when and where are parliamentary proceedings published?
- What procedural rules apply to published parliamentary proceedings?.

Setiap peserta diberi kesempatan untuk berdiskusi menyampaikan pemikiran dan berbagi pengalaman dalam menyimpan rekaman pelaksanaan kegiatan di parlemen negaranya secara permanen.

Berbagai pendapat dikemukakan oleh peserta yang hadir diantaranya **Van Cuong Bui**, Secretary General of the National Assembly of Viet Nam; **Raul Guzman Uribe**, Secretary General of the Senate of Chile, **Farid Hajiyev**, Chief of Staff of the Milli Majlis of the Republic of Azerbaijan; **Suprihatini**, Deputy Secretary General of Indonesia House of Representatives; **Laurent Scheeck**, Secretary General of the Chamber of Deputies of Luxembourg Luxembourg; **Arpath Sukhanunth**, Secretary General of the House of Representatives of Thailand; dan **Alejandro Muñoz Hidalgo**, Secretary General of the National Assembly of Ecuador.



Van Cuong Bui dari Vietnam menyatakan bahwa parliamentary proceeding di negaranya dilakukan menggunakan metode perekaman yang kemudian dituangkan dalam transkrip oleh staf yang bertugas. Transkripsi disimpan di Parlemen Vietnam selama 10 tahun sebelum dipindahkan ke instansi yang mengelola kearsipan nasional. Kendala yang dihadapi oleh Vietnam adalah kekurangan SDM, belum adanya teknologi dan infrastruktur yang memadai. Dalam waktu dekat Parlemen Vietnam berencana untuk melakukan perbaikan proses bisnis penyusunan parliamentary proceeding dan membuat software yang akan mempermudah penyusunannya.

Raul Guzman Uribe dari Chile menyatakan bahwa terdapat 2 metode yang digunakan dalam penyusunan parliamentary proceeding, yaitu pertama metode konvensional baik melalui perekaman yang diubah menjadi transkrip maupun pencatatan saat sidang berlangsung. Metode kedua adalah penggunaan Artificial Intelijen dalam setiap persidangan. Hasil dari AI akan dikoreksi oleh staf parlemen Chile yang bertugas sebagai transkriptor dalam waktu 5 hari. Pengembangan AI ini dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Parlemen Chile dan akan terus dikembangkan di masa yang akan datang.

Farid Hajiyev dari Azerbaijan menyatakan bahwa Mili Majelis Azerbaijan menggunakan minutasasi dalam penyusunan parliamentary proceeding. Minutasasi mencakup hal-hal yang bersifat administratif tidak hanya bersifat substansi. Setelah parliament proceeding tersusun, staff parlemen akan menyusun indeksasi parliament proceeding agar lebih mempermudah akses masyarakat terhadap parliament proceeding.

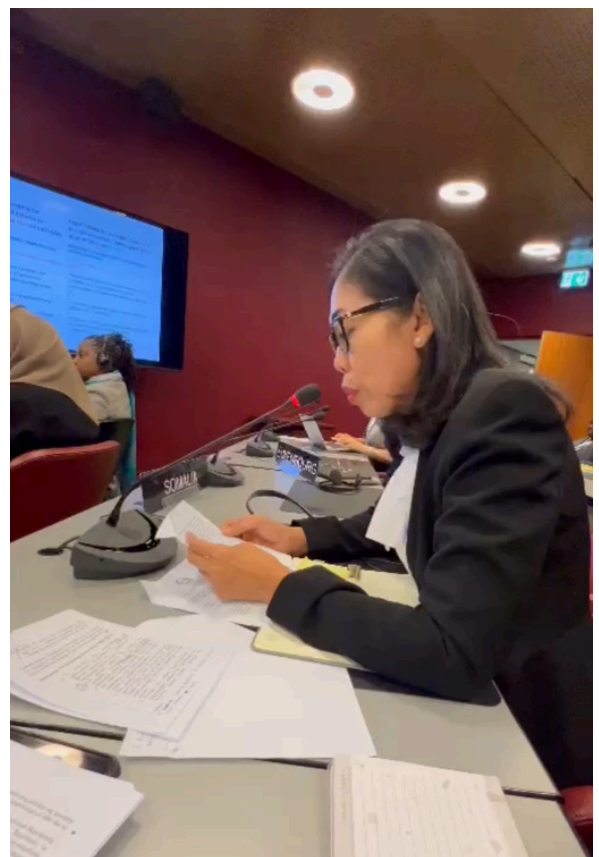


Suprihartini dari Indonesia menyatakan bahwa Parliamentary Proceeding merupakan landasan dalam mewujudkan tata kelola pelaksanaan tugas parlemen yang transparan. Parlemen Indonesia menggunakan sistem yang cermat untuk merekam jalannya persidangan, dengan alat utama berupa rekaman audio untuk menangkap makna dari jalannya persidangan.

Hasil perekaman akan dituangkan dalam transkrip oleh perisalah. Parlemen Indonesia melihat potensi penggunaan perangkat lunak transkripsi canggih dan kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam mengubah audio menjadi teks.

Publikasi hasil persidangan, dijamin oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang diberlakukan pada tahun 2008. Platform utama untuk berbagi parliamentary proceeding adalah situs web Parlemen Indonesia.

Publikasi juga dilakukan secara aktif melalui siaran TV nasional, siaran TV Parlemen, dan media sosial termasuk Youtube. Parlemen Indonesia menyampaikan harapannya untuk berdiskusi dan berkolaborasi lebih lanjut dengan parlemen negara lain untuk mengembangkan proses penyusunan dan publikasi parliamentary proceeding.



Laurent Scheeck dari Luxemburg menyatakan bahwa Parlemen di negaranya telah menggunakan teknologi penyusunan transkripsi otomatis, namun karena bahasa yang digunakan di Parlemen Luxemburg beragam hal tersebut menimbulkan resiko keraguan reabilitas hasil transkripsi otomatis. Sejak tahun 2020 Parlemen Luxemburg telah memperkerjakan perisalah untuk melakukan pengecekan kembali hasil mesin transkripsi otomatis.

Arpath Sukhanunth dari Thailand menyampaikan bahwa saat ini masih digunakan berbagai metode dalam penyusunan parliamentary proceeding, yaitu pencatatan secara langsung oleh stenograph pada saat sidang berlangsung. Penggunaan digital recorder yang kemudian hasilnya diubah menjadi transkrip persidangan oleh perisalah, dan mesin transkripsi berbasis AI. Thailand mengakui bahwa penggunaan stenograph merupakan cara tradisional, namun masih terus dipertahankan untuk menjaga reabilitas penyusunan parliamentary proceeding

Alejandro Muñoz Hidalgo dari Ecuador menyatakan bahwa Ecuador masih menggunakan berbagai metode dalam penyusunan parliamentary proceeding, antara lain perekaman suara digital, perekaman video, hasil tayangan televisi nasional maupun parlemen. Hasil perekaman tersebut diserahkan pada transkriptor untuk kemudian dituangkan dalam parliamentary proceeding. Publikasi parliamentary proceeding juga dilakukan secara meluas baik secara konvensional melalui jalur permintaan online dan offline, penyebaran melalui website parlemen, dan pengumuman melalui media sosial seperti instagram maupun youtube. Ecuador belum menggunakan AI dalam penyusunan parliamentary proceeding di negaranya.



Penyusunan *parliamentary proceeding* di berbagai negara menggunakan berbagai metode, yaitu pencatatan oleh staf secara langsung saat persidangan berlangsung, perekaman menggunakan alat perekam suara untuk kemudian dituangkan dalam bentuk transkrip, penayangan video jalannya sidang secara live maupun siaran tunda, dan penggunaan AI untuk mengubah rekaman suara maupun video menjadi transkrip. Keseluruhan metode yang digunakan tidak lepas dari peran manusia. Hal tersebut untuk memastikan reabilitas dan kesesuaian hasil transkrip dari parliament proceeding.

Hasil General Debate tentang “Keeping the Permanent Record of Debates in Parliament: What are The Tools of Today and Tomorrow” menganjurkan agar setiap Sekretariat Parlemen Anggota ASGP dapat melakukan pengembangan penggunaan teknologi termasuk AI dalam proses penyusunan *parliamentary proceeding* di negaranya masing-masing. Namun proses pengembangan tersebut tetap harus diimbangi dengan pengembangan SDM pelaksana penyusunan *parliamentary proceeding*.

Secara umum, sekretariat jenderal parlemen negara anggota ASGP menyediakan berbagai metode dalam penyebarluasan *parliamentary proceeding*, yaitu:

- **Metode konvensional dalam bentuk permintaan berkas baik secara online maupun offline.**
- **Mengunggah *parliamentary proceeding* di website;**
- **Mengunggah cuplikan *parliamentary proceeding* melalui media sosial; dan**
- **Menayangkan pelaksanaan sidang secara live maupun siaran tunda baik melalui saluran tv nasional, saluran tv parlemen, maupun youtube.**



THEME: THE ATTENDANCE OF MINISTERS OF STATE TO PARLIAMENT, TO REPORT AND GIVE EXPLANATIONS ABOUT THEIR MANAGEMENT OF GOVERNMENT BUSINESS

Sesi ini dipimpin langsung oleh Mr Najib El Khaldi, Presiden ASGP. Pada sesi pembahasan tema “The Attendance of Ministers of State to Parliament, to Report and Give Explanations about their Management of Government Business”, terdapat 5 Anggota ASGP yang menyampaikan pernyataan resmi (*communication*). Setiap pembicara menyampaikan tentang praktik kehadiran eksekutif dalam rapat di parlemen, kegunaannya dan bagaimana proses tersebut berdampak pada pelaksanaan tugas parlemen.

a. José Pedro Montero, Wakil Sekretaris Jenderal Senat Uruguay

Pernyataan resmi dengan judul “Control of the Executive Power by Parliamen”, memuat penjelasan tentang bahwa Parlemen Uruguay memiliki 3 alasan rapat terkait pemanggilan eksekutif ke parlemen. rapat yang dimaksud adalah :

- permintaan keterangan berupa data atau laporan,
- pemanggilan menteri negara ke parlemen, atau
- pembentukan komisi investigasi parlemen.

Ketiga jenis rapat tersebut dapat digunakan untuk menjalankan tugas legislasi, pengawasan maupun anggaran.

b. Daniel Guspan, Sekretaris Jenderal Kanselir Dewan Nasional Slovakia

Pernyataan resmi dengan judul “Ministers on deck : (Un)limited power under control” yang membahas mekanisme pengawasan kekuasaan eksekutif oleh parlemen Slovakia terkait advokasi kepentingan pemilih melalui legislasi. Pada tahun 2022, Parlemen Slovakia membahas 49 laporan masyarakat. Pemerintah telah menjawab 39 interpelasi diajukan, dengan fokus pada area sosial, ekonomi, kesehatan, lingkungan, dan transportasi.





c. Ahmed Manna, Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Mesir

pernyataan resmi dengan judul “The Attendance of Ministers of State to Parliament, to Report and Give Explanations About Their Management of Government Business” membagikan pengalaman Parlemen Mesir menjalankan pengawasan parlemen terhadap kinerja otoritas eksekutif di Mesir. Pengawasan parlemen terhadap kinerja otoritas eksekutif merupakan pilar integral dalam sistem demokrasi. Hal ini terkait erat dengan prinsip pemisahan kekuasaan dan merupakan alat utama bagi anggota parlemen untuk memantau kebijakan umum pemerintah.

Pasal 136 Konstitusi Mesir mewajibkan Perdana Menteri, menteri, dan deputi untuk hadir di sidang parlemen atau komitennya jika diminta. Kehadiran ini penting untuk komunikasi yang konstan antara menteri dan anggota parlemen, meningkatkan komitmen pemerintah di hadapan rakyat.

Mesir menekankan pentingnya mekanisme pengawasan parlemen untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Melalui berbagai alat pengawasan yang tersedia, parlemen Mesir berupaya memastikan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan dan pemantauan tindakan pemerintah. Pertemuan dan dialog reguler antar anggota parlemen menjadi sumber penting untuk pengembangan dan tata kelola kerja parlemen yang lebih baik.



d. Jean Mukuala Bateke, Sekretaris Jenderal Senat Republik Demokratik Kongo

Pernyataan resmi dengan judul “On the presence of Ministers in Parliament”. Kehadiran menteri di Parlemen RD Kongo merupakan sarana bagi anggota parlemen mengajukan pertanyaan lisan, pertanyaan tertulis, pembahasan isu terkini, pelaksanaan hak Interpelasi terkait dengan kebijakan pemerintah terhadap tindakan politik atau situasi tertentu.

Selain itu, menteri dapat hadir ke Parlemen dalam rangka penyelenggaraan komisi penyelidikan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi terlengkap tentang fakta tertentu yang tidak atau kurang diketahui parlemen dan menyampaikan kesimpulannya kepada Sidang Paripurna.

Kehadiran menteri di parlemen merupakan hal yang penting sebagai bagian dari mekanisme pengawasan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kontrol demokratis dalam pemerintahan RD Kongo. Melalui berbagai alat pengawasan seperti pertanyaan parlemen, interpelasi, komisi penyelidikan, dan mosi tidak percaya, parlemen berupaya untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah demi kepentingan publik.

e. Prof. Rassmi Beruwien, Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Libya

Pernyataan resmi dengan judul “The attendance of Ministers of State to Parliament, to report and give explanations about their management of government business” membagikan pengalaman Libya dalam mengundang menteri negara di Parlemen untuk melaporkan dan memberikan penjelasan tentang pengelolaan urusan eksekutif.



e. Suprihartini, Deputi Bidang Persidangan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia

Pernyataan resmi dengan judul “The attendance of Ministers of State to Parliament, to report and give explanations about their management of government business” menjelaskan bahwa kehadiran Menteri dalam rapat/persidangan parlemen merupakan hal yang sangat penting dalam upaya mencapai transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang efektif.

Dalam sebuah demokrasi yang berfungsi dengan baik, hubungan antara cabang eksekutif dan legislatif adalah simbiotik, di mana masing-masing berperan sebagai kontrol yang sangat penting bagi yang lainnya. Dalam konteks ini, kehadiran Menteri di Parlemen Indonesia memiliki signifikansi yang sangat besar. Kehadiran mereka bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah kewajiban yang didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola demokratis.

Diskusi tentang kehadiran Menteri Negara di Parlemen menyoroti pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam proses demokratis. Setiap pembicara menekankan bahwa kehadiran dan keterlibatan Menteri Negara di Parlemen merupakan bagian integral dari mekanisme pengawasan untuk memastikan pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam praktiknya, melalui berbagai alat pengawasan seperti interpelasi, komisi penyelidikan, dan sesi tanya jawab, parlemen memiliki peran kunci dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif serta memastikan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. merupakan salah satu pilar demokrasi yang penting mewujudkan transisi tersebut.



A. SIDANG HARI KEDUA

Senin 25 Maret 2024

Terdapat 4 sesi pada hari kedua Sidang ASGP. Sesi yang dimaksud adalah:

- Kelanjutan pembahasan tema tentang “In the news and innovations at Parliament”,
- Pembahasan tema tentang “Parenthood and Parliament”
- Perkembangan Baru atas Kinerja IPU.
- Debat Umum tentang “Hubungan antara Dunia Akademik dengan Parlemen”

THEME: IN THE NEWS AND INNOVATIONS AT PARLIAMENT

Sesi ini merupakan kelanjutan sesi dengan tema pembahasan yang sama pada hari pertama.

a. Baek Jae Hyun, Sekretaris Jenderal Majelis Nasional Republik Korea

Majelis Nasional Korea telah berhasil mengimplementasikan berbagai teknologi digital, termasuk sistem pemungutan suara elektronik, publikasi daring, dan tempat digital untuk sesi pleno. Majelis Nasional Korea telah mengembangkan sistem berbasis AI untuk membantu dalam kegiatan legislatif dan meningkatkan kesadaran publik melalui sistem penyiaran daring. Selain itu, Majelis Nasional Korea saat ini dalam tahapan pengembangan Platform Big Data untuk analisis informasi yang lebih efektif.



Majelis Nasional Korea juga melakukan inovasi melalui upaya penanganan krisis iklim. Untuk menangani krisis iklim, Majelis Nasional Korea telah mengesahkan berbagai undang-undang, termasuk UU Kerangka Kerja Pertumbuhan Hijau Rendah Karbon dan UU Kerangka Kerja Netralitas Karbon dan Pertumbuhan Hijau. Majelis Nasional Korea juga mengusulkan pembentukan komite khusus perubahan iklim sebagai komite tetap dan pemasangan Jam Iklim di parlemen untuk meningkatkan kesadaran. Dalam kesempatan ini, Majelis Nasional Korea mengajak Parlemen di seluruh dunia harus berbagi pengetahuan dan bekerja sama untuk menghadapi tantangan global dan mempromosikan demokrasi parlemen serta kemakmuran bersama.

b. Dr. Silke Albin, Wakil Sekretaris Jenderal Bundestag Jerman

Pernyataan resmi dengan judul 'The potential of citizens' assemblies for parliamentarianism', membagikan pengalaman Bundestag Jerman membentuk Majelis Warga untuk pertama kalinya. Pembentukan Majelis Warga dilakukan untuk memperkuat demokrasi parlementer di Jerman. Majelis warga membuka kesempatan masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam proses pembuatan legislasi dan kebijakan yang berpengaruh secara langsung dalam kehidupan mereka.

Majelis ini membantu meningkatkan partisipasi publik dan memberikan pandangan yang lebih luas kepada pembuat kebijakan.. Tantangan yang dihadapi dalam pembentukan Majelis Warga adalah memastikan komposisi majelis merepresentasikan keseimbangan dan pelaksanaan rekomendasi.



THEME: PARENTHOOD AND PARLIAMENT

Pada sesi pembahasan tema “Parenthood and Parliament”, terdapat 4 Anggota ASGP yang menyampaikan pernyataan resmi (communication). Setiap pembicara menyampaikan bagaimana parlemen dapat mendukung Anggota Parlemen yang menjadi orang tua. Apa saja aturan untuk anggota parlemen yang ingin mengambil cuti melahirkan dan cuti ketika seorang anggota parlemen menjadi seorang ayah?

a. Eric Janse, Clerk of the House of Commons of Canada

Pernyataan resmi dengan judul “Parental accommodations and benefits for members at the House of Commons” membahas bagaimana parlemen dapat menjadi lebih ramah keluarga bagi para anggotanya, dengan fokus pada integrasi kehidupan keluarga dan pekerjaan parlemen. House of Commons of Canada menyatakan bahwa upaya menciptakan parlemen yang ramah keluarga adalah tanggung jawab bersama antara setiap pihak yang ada di lingkungan parlemen.

Pembentukan parlemen yang ramah keluarga melibatkan pihak administrasi, Board of Internal Economy, House of Commons, dan Pemerintah Kanada. Selain itu, House of Commons of Canada membentuk Komite Tetap tentang Prosedur dan Urusan Rumah Tangga. Komite ini melakukan studi formal untuk menciptakan parlemen yang ramah keluarga, mengidentifikasi tantangan, dan membuat rekomendasi untuk mengintegrasikan kehidupan keluarga dengan pekerjaan parlemen.



Beberapa mekanisme yang diciptakan oleh House of Commons of Canada untuk mewujudkan parlemen ramah keluarga, antara lain:

- Menetapkan prosedur hybrid dalam pelaksanaan persidangan. House of Commons of Canada telah menciptakan sesi hybrid yang fleksibel untuk mendukung keseimbangan kerja dan keluarga.
- Memberikan fasilitas dan layanan untuk keluarga, seperti membangun ruang untuk anak-anak.
- Kebijakan yang memungkinkan anak-anak untuk hadir di ruang sidang adalah bagian dari upaya mendukung anggota parlemen yang merupakan orang tua.



Melalui Sidang ASGP, House of Commons of Canada menyarankan agar anggota ASGP untuk melakukan diskusi dan evaluasi berkelanjutan terhadap inisiatif pembentukan parlemen yang ramah keluarga. Hasil diskusi dan evaluasi tersebut akan bermanfaat untuk menemukan cara baru yang dapat digunakan untuk mendukung anggota parlemen dengan keluarga.



b. Ms Steejit Taipiboonsuk, Deputy Secretary General of the House of Representatives of Thailand

Pernyataan resmi dengan judul “Improving Parliament for Parents: a case of Thai House of Representatives’ yang membahas tentang inisiatif House of Representatives Thailand dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung bagi orang tua di parlemen, untuk meningkatkan jumlah anggota parlemen muda dan perempuan di Thailand.

Saat ini terjadi peningkatan jumlah perempuan di parlemen Thailand menjadi 19,4% atau 97 anggota. Selain itu juga terjadi peningkatan jumlah anggota parlemen muda menjadi 215 dari 132 pada pemilu 2019. Perubahan demografi ini memerlukan peninjauan ulang terhadap kebijakan untuk memastikan parlemen tetap kuat dan adaptif terhadap kebutuhan anggotanya. Perubahan demografi dengan meningkatnya jumlah anggota parlemen muda dan perempuan mendorong penyesuaian kebijakan untuk mendukung mereka dalam menjalankan tugasnya dengan tetap mengedepankan perannya sebagai orang tua.

Konstitusi Thailand menetapkan dua sesi Majelis Nasional setiap tahun. Masing-masing sesi diselenggarakan selama 120 hari. Dalam kedua sesi tersebut terdapat kewajiban bagi anggota parlemen yang tidak hadir lebih dari seperempat jumlah hari sidang tanpa izin akan mendapatkan sanksi pemberhentian. Peraturan tersebut diubah pada tahun 2019. Anggota parlemen yang tidak bisa hadir harus mengajukan surat izin kepada Ketua Dewan. Sehingga kehadiran anggota parlemen dapat lebih fleksibel. Fleksibilitas juga diterapkan untuk anggota parlemen yang mengajukan cuti untuk alasan pribadi, salah satunya adalah kelahiran anak pertama.



Parlemen Thailand mengatur beberapa benefit bagi anggota parlemen Thailand yang menjalani cuti melahirkan. Benefit yang dimaksud adalah:

- asuransi medis yang mencakup biaya dari kehamilan hingga persalinan hingga 1.125 USD.
- dukungan finansial berupa tunjangan bulanan selama cuti melahirkan. Tunjangan tersebut diluar penghasilan umum sebagai anggota parlemen, yaitu gaji pokok sekitar 2.000 USD dan tunjangan pokok sekitar 1.190 USD.

Tidak hanya dukungan dari parlemen ramah anak bagi pelaksanaan tugas anggota parlemen, sekretariat parlemen Thailand juga menginisiasi Proyek Sekretariat untuk Mendukung Parenthood. Proyek tersebut diwujudkan melalui penyediaan fasilitas ruang menyusui di Gedung Parlemen. Upaya yang diinisiasi oleh Parlemen Thailand dan Sekretariat Jenderal Parlemen Thailand merupakan dedikasi terhadap prinsip inklusivitas, keragaman, dan kesejahteraan anggota.



c. Liam Laurence Smyth, Clerk of Legislation at UK House of Commons

Pernyataan resmi dengan judul "*Parental leave in the House of Commons*" yang membahas berbagai inisiatif dan kebijakan yang telah diambil untuk mendukung anggota parlemen yang memiliki tanggung jawab sebagai orang tua. Parlemen Inggris menghadapi beberapa tantangan untuk mewujudkan hal tersebut, antara lain kurangnya dukungan untuk penitipan anak, jam kerja yang tidak ramah keluarga, dan tidak adanya kebijakan formal tentang cuti orang tua (*parental leaving*), khususnya cuti bagi anggota parlemen yang menjadi ayah. Cuti biasanya diberikan secara tidak resmi dan tergantung pada kebijakan pimpinan Parlemen Inggris, yang menyebabkan keengganan Anggota Parlemen Inggris untuk mengajukannya.

Saat ini Parlemen Inggris sedang dalam proses inisiasi perjanjian lintas partai untuk memberikan cuti secara formal, termasuk untuk alasan mengasuh anak, perawatan saat anggota keluarga sakit, atau berkabung. Inisiasi ini dijalankan berdasarkan kerangka kerja GSP (Good Services Practice) dari IPU. Penerapan kerangka kerja GSP diharapkan dapat menciptakan parlemen yang lebih baik dan inklusif.

Beberapa langkah nyata yang dipraktikkan oleh Parlemen Inggris untuk mewujudkan dukungan terhadap anggota parlemen yang memiliki tanggung jawab sebagai orang tua, antara lain: Membangun penitipan anak di Gedung House of Commons dan menyediakan mekanisme voting proxy online pada ~~2020~~ dan 2023 untuk mendukung anggota parlemen yang tidak bisa hadir. Diskusi dan kolaborasi lintas partai diperlukan untuk menyamakan persepsi partai yang ada di Parlemen Inggris memberikan jaminan terhadap anggota parlemen untuk tetap menjalankan peran mereka tanpa mengorbankan tanggung jawab keluarga.



d. Fiona Kalemba, Clerk of the National Assembly of Malawi

Pernyataan resmi dengan judul *“Parenthood and Parliament: What are the Rules for Parliamentarians Who Wish to Take Maternity and Paternity Leave? (The Case of the Malawi National Assembly)”* membahas mengenai praktik kebijakan pemberian cuti melahirkan dan cuti ayah di Parlemen Malawi, dan tantangan yang dihadapi oleh anggota parlemen yang menjadi orang tua selama masa jabatan mereka.

Parlemen Malawi memiliki 193 anggota, dengan sekitar 37% di bawah usia 40 tahun. Sejak 2019 hingga Desember 2023, setidaknya 4 anggota parlemen telah menjadi orang tua. Penyediaan ruang menyusui dan penitipan anak di dekat parlemen untuk mendukung orang tua bekerja sambil merawat anak mereka. Perlu adanya undang-undang dan kebijakan yang memberikan cuti ayah untuk mendorong pembagian tanggung jawab keluarga yang lebih adil.

Undang-Undang Ketenagakerjaan Malawi mengatur cuti melahirkan minimal 8 minggu dengan gaji penuh setiap 3 tahun. Sejak 2021, cuti ayah telah diberikan selama 2 minggu. Tidak ada kebijakan formal untuk anggota parlemen, tetapi mereka dapat mengajukan izin cuti melalui otoritas Ketua Dewan. ILO memiliki mengesahkan panduan yang dapat diadaptasi untuk mewujudkan dukungan bagi anggota parlemen yang menjadi orang tua. Beberapa parlemen memiliki pengaturan administratif untuk mendukung anggota yang menjadi orang tua, seperti waktu cuti, fasilitas penitipan anak, dan fleksibilitas jam kerja. Durasi cuti melahirkan berkisar dari 6 minggu hingga 6 bulan, sedangkan cuti ayah bervariasi dari tidak ada hingga beberapa minggu atau fleksibilitas jam kerja.



UPDATE KINERJA IPU

ASGP menerima update dari IPU mengenai Laporan Wanita di Parlemen, yang disampaikan oleh Ms Kareen Jabre dan Ms Sarah Babic. Update mengenai perkembangan terbaru terkait perempuan di parlemen, kebijakan anti-pelecehan yang diberlakukan oleh IPU, serta survei mengenai seksisme dan kekerasan terhadap anggota parlemen. Saat ini terdapat tren peningkatan jumlah Perempuan di Parlemen.

Pada tahun 2024, secara internasional sebanyak 26,9% anggota parlemen adalah perempuan, jumlah tersebut merupakan peningkatan 0,4 % dari tahun sebelumnya. Peningkatan terbesar terjadi di wilayah Sub-Sahara Afrika yaitu 3,9 % dari pemilihan sebelumnya. Amerika memiliki 35,1% kursi, dengan lima negara bagian (Kuba, Nikaragua, Meksiko, Kosta Rika, dan Bolivia) berada di antara 10 besar secara global.

Perempuan mengisi 42,5% kursi parlemen terbaru pada tahun 2023. Sedangkan di Parlemen Eropa, terdapat 31,6% kursi parlemen diduduki oleh wanita. Kawasan Pasifik merupakan satu-satunya wilayah Kawasan yang mengalami di mana persentase perempuan yang menduduki kursi di parlemen. Hal tersebut terjadi di Selandia Baru -2,8 %, sedangkan Timor Leste memilih persentase perempuan tertinggi (33,8%) di wilayah tersebut.

Peningkatan jumlah tersebut dapat menimbulkan dampak negatif dari peningkatan jumlah kursi Perempuan di parlemen adalah terjadinya kekerasan terhadap anggota parlemen perempuan. Berdasarkan hasil pemantauan IPU, Kekerasan terhadap kandidat anggota parlemen perempuan merupakan hambatan utama untuk kesetaraan dalam politik, hal tersebut banyak terjadi di seperti yang terlihat dalam pemilihan di Liberia, Selandia Baru, Polandia, dan Thailand. Selain itu, banyak anggota parlemen perempuan berbicara tentang pengalaman mereka mengalami pelecehan di negara seperti Australia, Prancis, dan Inggris.



IPU menginisiasi Kebijakan Anti-Pelecehan bagi anggota parlemen perempuan. Inisiasi tersebut dapat diberlakukan terhadap semua peserta Sidang IPU baik secara langsung, virtual, atau hybrid. Pelindungan tersebut diberikan selama acara IPU berlangsung. Komponen utama dari kebijakan anti pelecehan memiliki beberapa pokok pengaturan, yaitu:

- Pencegahan. Pencegahan dilakukan untuk mempromosikan pemahaman bersama tentang lingkungan tanpa toleransi terhadap pelecehan.
- Dukungan dan Bantuan, dengan memberikan bantuan kepada orang yang melaporkan insiden pelecehan.
- Hukum Acara penanganan yang memuat mekanisme penyelidikan dan penyelesaian masalah melalui permintaan tanggung jawab.
- Pembentukan Kelompok Anti-Pelecehan yang bertugas mendengarkan kesaksian korban, memberikan informasi praktis, dan memberikan panduan tentang prosedur formal dan informal.

Mekanisme pemantauan Kebijakan Anti-Pelecehan ditindaklanjuti melalui survei tentang Seksisme, Pelecehan, dan Kekerasan terhadap Anggota Parlemen. Survei tersebut diselenggarakan secara regional dan global. Survei yang sedang berlangsung adalah “Survei regional untuk parlemen Asia-Pasifik tentang seksisme dan pelecehan di Parlemen” dan “Survei global tentang kekerasan dalam kehidupan publik”. IPU mengajak setiap negara anggota IPU untuk berperan aktif mengisi survei yang diselenggarakan secara mandiri oleh masing-masing anggota IPU tersebut. IPU terbuka terhadap permintaan kerja sama dalam penyelenggaraan survei tersebut.

GENERAL DEBATE : THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ACADEMIC WORLD AND PARLIAMENTS

Sesi ini moderatori oleh Mr Remco Nehmelman, Secretary General of the Senate of the Netherlands. Pertanyaan pemantik yang digunakan dalam debat umum ini adalah:

- How can professors of law exchange ideas with practitioners in parliament?;
- Should the Secretary General Encourage Relations between Parliamentary Personnel and Researchers?;

Berbagai pendapat dikemukakan oleh peserta yang hadir diantaranya **Philippe Schwab**, Sekretaris Jenderal Majelis Federal Swiss; **Suprihatini**, Deputy Bidang Persidangan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia; dan **Pramod Chandra Mody**, Sekretaris Jenderal Parlemen India

Philippe Schwab, menyatakan bahwa bentuk institusi keparlemenan mempengaruhi sumber daya dukungan pelaksanaan tugas parlemen. Parlemen Swiss adalah "*part time parlemen*" di mana anggota parlemen tetap menjalankan profesi mereka di samping karier parlementer mereka secara paruh waktu. Parlemen Swiss tidak memiliki unit riset internal atau think tank seperti di beberapa parlemen lain (misalnya, UK, Jerman, Austria). Namun, ada beberapa cara untuk memanfaatkan keahlian ilmiah dalam pembahasan rancangan undang-undang.

Sejak tahun 2002 Parlemen Swiss juga melakukan peningkatan kompetensi staf sekretariat parlemen, melalui pemberian beasiswa kepada 2 staf tiap tahun. Langkah lain yang dilakukan oleh Parlemen swiss adalah melibatkan akademisi dalam seluruh proses pembuatan kebijakan, untuk memastikan hasil temuan ilmiah dapat diadopsi dalam kebijakan.



Keterlibatan dunia akademik dalam pelaksanaan tugas parlemen di swiss dilakukan dalam kegiatan:

- Parlemen (melalui komite tertentu) mengundang perwakilan kelompok kepentingan dan ilmuwan terkemuka dalam rapat dengar pendapat sebelum pembahasan rancangan undang-undang.
- Komite dan delegasi memiliki anggaran untuk menugaskan penelitian eksternal, biasanya dalam bentuk pendapat hukum.
- Pelibatan dunia akademik dalam pelaksanaan pengawasan oleh parlemen.
- Penyelenggaraan Konsultasi Pra-Parlementer, dimana pihak berkepentingan, termasuk dunia akademik, diundang untuk memberikan komentar tentang rancangan undang-undang.
- Parlemen juga dapat meminta pemerintah melakukan penelitian atau menugaskan akademisi meneliti topik tertentu dan menyampaikan laporannya ke parlemen.





01.

Ms Suprihatini menyatakan Hubungan antara dunia akademis dan parlemen Indonesia merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Dalam pidato ini, disoroti bagaimana kolaborasi antara kedua entitas ini dapat memperkaya proses legislatif dan pembuatan keputusan yang lebih baik.

DPR RI telah mengupayakan berbagai langkah untuk mendekatkan dunia akademis dan kebutuhan praktis badan legislatif. Salah satu contohnya adalah pembentukan Badan Keahlian di Sekretariat Jenderal yang berfungsi memberikan dukungan keahlian dari para profesional keahlian pada pelaksanaan tugas Anggota DPR RI.

Akademisi dari berbagai universitas juga dapat memberikan kontribusi dalam debat parlemen melalui testimoni ahli, peran penasihat, dan proyek penelitian kolaboratif. Kolaborasi seperti ini memperkaya pembahasan parlemen dan menghasilkan keputusan legislatif yang lebih kuat.



Pramod Chandra Mody, Sekretaris Jenderal Parlemen India menyatakan bahwa Parlemen India menjalankan fungsi legislatif, deliberatif, dan pengawasan dalam kerangka konstitusional demokrasi parlementer. Keterlibatan dunia akademik dalam pembahasan rancangan undang-undang membantu anggota parlemen untuk memahami materi muatan RUU dari sisi akademik. Selain itu, Parlemen India mengundang praktisi dan akademisi untuk menjadi narasumber dalam kegiatan seminar, workshop dan diskusi dan ceramah untuk memperdalam pemahaman anggota parlemen tentang legislasi.

Selain itu, Parlemen India menawarkan program magang kepada mahasiswa untuk memberikan pengalaman langsung tentang fungsi demokrasi parlementer di India. Upaya lain yang dilakukan oleh Parlemen India adalah menawarkan kesempatan kepada para sarjana untuk terlibat dalam penelitian dan studi komparatif tentang fungsi Parlemen dan institusi demokrasi lainnya.



A. SIDANG HARI KETIGA

Selasa 26 Maret 2024

Terdapat 3 sesi pada hari Ketiga Sidang ASGP. Sesi yang dimaksud adalah:

- Pemilihan untuk mengisi 1 jabatan kosong di jajaran Komite Eksekutif
- Pembahasan tema tentang “Parliament’s Framework and Tools for Efficiently Scrutinising Government Spending?”
- Pembahasan Rancangan Agenda untuk Sidang ASGP Jenewa (Oktober 2024)

PEMILIHAN ANGGOTA KOMITE EKSEKUTIF

Terdapat 1 posisi kosong dalam Komite Eksekutif ASGP. Sidang ASGP pada musim semi 2024 menyelenggarakan pemilihan untuk mengisi kekosongan posisi tersebut. Dalam pemilihan tersebut, **Pedro Agostinho de Neri**, Sekretaris Jenderal Majelis Nasional Angola, terpilih sebagai anggota biasa Komite Eksekutif.

Selanjutnya pada sesi musim gugur 2024, akan diadakan pemilihan Presiden baru ASGP, 1 Wakil Presiden baru ASGP, dan 1 anggota biasa Komite Eksekutif.



Suasana Pemilihan Anggota Komite Eksekutif



THEME: PARLIAMENT'S FRAMEWORK AND TOOLS FOR EFFICIENTLY SCRUTINISING GOVERNMENT SPENDING?

Sesi ini mengusung tema tentang “Parliament’s Framework and Tools for Efficiently Scrutinising Government Spending?”. Terdapat 3 pembicara yang menyampaikan pernyataan resmi terkait tema ini, yaitu **Éric Tavernier**, Sekretaris Jenderal Senat Prancis, **Edgar Sequeira Martins**, Sekretaris Jenderal Majelis Nasional Timor Leste, dan **Reginald S. Velasco**, Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Filipina.

a. Éric Tavernier, Sekretaris Jenderal Senat Prancis

Pernyataan resmi dengan judul “Parliements Framework and Tools for Scrutinising Government Spending” (Mekanisme Kerja Dan Teknik Yang Digunakan Dalam Pengawasan Parlemen Terhadap Pengelolaan Anggaran Negara Oleh Pemerintah). Menggambarkan mekanisme pengawasan terhadap tindakan pemerintah oleh parlemen Prancis yang diatur melalui Undang-Undang Konstitusi no 2008-724.

Salah satu tugas Parlemen Prancis adalah membahas dan menyetujui rencana anggaran keuangan negara bersama pemerintah. Tidak hanya membahas dan menyetujui anggaran yang digunakan oleh pemerintah, Parlemen juga bertugas mengawasi melalui program audit tahunan yang disetujui oleh Komite Keuangan. Hasil audit tahunan dilaporkan dan dipublikasikan kepada publik untuk mewujudkan transparansi. Dalam pelaksanaan fungsi anggaran ini, Parlemen Prancis juga menggunakan bantuan eksternal, seperti praktisi keuangan dan auditor, untuk mendukung tugas pengawasannya.



b. Mr. Edgar Sequeira Martins, Sekretaris Jenderal Majelis Nasional Timor Leste

Pernyataan resmi dengan judul “Parliament Framework and Instruments for Effective Control of Spending” membagikan pengalaman terkait dengan penyusunan kerangka kerja parlemen dan instrumen untuk pengawasan pengeluaran publik yang efektif. Kerangka kerja dan instrumen yang digunakan menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas finansial sebagai pilar utama kepercayaan warga terhadap institusi pemerintah.

Parlemen Nasional Timor Leste telah mengesahkan Decree-Law No. 1/2023 dan Law No. 2/2022 yang mengatur mekanisme pelaksanaan penggunaan anggaran negara dan kerangka umum anggaran negara serta manajemen keuangan publik. Selain itu, undang-undang tersebut juga mengatur mengenai kewenangan pengawasan parlemen terhadap penggunaan anggaran negara oleh eksekutif. Dalam menjalankan tugasnya, Parlemen Timor Leste dapat membentuk komite khusus yang dapat menyelenggarakan penggalangan pendapat publik.

Pelaksanaan kewenangan tersebut mengalami berbagai kendala, antara lain minimnya pemahaman Anggota Parlemen terhadap pengelolaan anggaran negara dan minimnya akses informasi parlemen terhadap informasi finansial yang dikelola eksekutif.

Kendala tersebut diatasi melalui penyelenggaraan pelatihan di bidang pengawasan finansial terhadap anggota Parlemen Timor Leste. Selain itu, Parlemen Timor Leste saat ini sedang membangun kemitraan dengan UNDP untuk pengembangan alat pemantauan eksekusi anggaran. Kolaborasi internasional juga dianggap penting untuk mempromosikan praktik terbaik global. Dengan komitmen yang kuat, Parlemen Timor Leste bertujuan untuk memastikan stabilitas ekonomi, keadilan sosial, dan pembangunan berkelanjutan di negara tersebut.



c. Mr. Reginald S. Velasco, Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Filipina

Pernyataan resmi dengan judul “Parliament’s framework and tools for efficiently scrutinising government spending” membagikan pengalaman Parlemen Filipina terkait dengan praktik pengawasan parlemen terhadap pengelolaan anggaran negara oleh eksekutif, berdasarkan siklus anggaran. Siklus Anggaran di Filipina terdiri atas persiapan anggaran, pengesahan anggaran melalui undang-undang, pelaksanaan anggaran, dan akuntabilitas anggaran.

Fase persiapan anggaran, pemerintah sebagai pelaksana kebijakan negara dan menyusun laporan penggunaan anggaran. setelah itu, Pemerintah akan mengajukan dokumen rencana keuangan pada parlemen yang mencerminkan pos-pos kebutuhan anggaran dan menyediakan ruang fiskal untuk tren yang diantisipasi dan keadaan darurat yang tidak terduga. perencanaan akan dibahas dan disetujui oleh parlemen untuk disahkan melalui undang-undang.

Fase pelaksanaan anggaran. Eksekutif melaksanakan anggaran sesuai dengan postur anggaran yang telah disetujui oleh Parlemen.

Fase akuntabilitas (pertanggungjawaban penggunaan anggaran) dilaksanakan melalui penyelenggaraan pemeriksaan secara independen. Pengawasan anggaran oleh parlemen melibatkan komite-komite yang dibentuk secara khusus dan membutuhkan keseimbangan antara ketelitian dan dinamisme dalam melaksanakan tugas pengawasan anggaran.



PEMBAHASAN RANCANGAN AGENDA UNTUK SIDANG ASGP JENEWA (OKTOBER 2024)

Pembahasan ini dimulai dengan diskusi tentang penentuan tanggal sidang ASGP musim gugur. Kesepakatan tanggal Penyelenggaraan Sesi Musim Gugur Sidang ASGP 2024 adalah **14 hingga 16 Oktober 2024**.

Kesepakatan lain dari diskusi ini adalah pada sesi musim gugur, akan diselenggarakan sesi bersama ASGP-IPU yang dipimpin oleh Mr. Andy Richardson dan peringatan ulang tahun ke-85 ASGP.

Selain kesepakatan atas tanggal pelaksanaan, diajukan beberapa tema yang akan digunakan dalam Sesi Music Gugur Sidang ASGP 2024.

Tema Debat Umum yang ditawarkan adalah:

- The involvement of citizens in direct democracy by Parliament (eg. Citizens Assembly, petitions)
- Parliamentary Travel: adapting rules and procedures to an increasingly smaller world
- How can Secretaries General benefit from Artificial Intelligence whilst avoiding the risks?

Sedangkan Pembahasan Tema tertentu, akan membahas terkait:

- In the news and Innovations at Parliament
- Managing conflicting competencies between parliamentary committees

III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Kehadiran Delegasi ASGP DPR RI Sidang ASGP Jenewa 2024 memiliki nilai strategis baik dalam penguatan hubungan bilateral Sekjen DPR RI yang diwakili oleh Deputi Persidangan Sekjen DPR RI dengan Sekjen Parlemen negara IPU. Selain itu kehadiran delegasi Setjen DPR RI juga meningkatkan jejaring Setjen DPR RI dengan berbagai organisasi Internasional;

Peran serta Setjen DPR RI dalam menyampaikan intervensi dan praktik terbaik yang telah dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI pada sidang tersebut diharapkan dapat menjadi masukan bagi Parlemen lain dalam praktik dukungan kepada parlemen di negara masing-masing.

B. REKOMENDASI

Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan kepada Sekretariat Jenderal DPR RI setelah menghadiri sidang ASGP di Jenewa pada tanggal 24 hingga 26 Maret 2024:

- **Penguatan Kerjasama Internasional**

Sidang ASGP merupakan kesempatan untuk memperkuat kerjasama antara parlemen dari berbagai negara. Sekretariat Jenderal DPR RI dapat mengusulkan lebih banyak pertukaran informasi, pengalaman, dan praktik terbaik dengan parlemen lain.

- **Penyempurnaan Tata Kelola Internal**

Berdasarkan hasil diskusi sepanjang berjalannya sidang, Sekretariat Jenderal DPR RI dapat memperbaiki tata kelola internal, termasuk proses administrasi, manajemen data, dan efisiensi operasional.



- **Peningkatan Kapasitas SDM**

Setjen DPR RI dapat meningkatkan upaya pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) khususnya hal pengetahuan tentang tata kelola parlemen terkait dengan dukungan terhadap keseimbangan Anggota DPR RI dan perannya sebagai orang tua, pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap kegiatan pelaksanaan tugas seperti penyusunan parliamentary proceeding dan perwujudan partisipasi publik secara aktif.

- **Penggunaan Artificial Inteljen**

Setjen DPR RI dapat menyediakan sistem dukungan berbasis AI untuk memaksimalkan pelaksanaan fungsi keparlemenan yang lebih canggih sehingga dapat mempercepat proses administrasi, komunikasi, dan pelaporan.

- **Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas**

Setjen DPR RI dapat menyarankan penggunaan metode lain dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas-tugas DPR RI. Metode yang dimaksud antara lain membentuk mekanisme untuk melibatkan partisipasi publik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI secara langsung.



IV. PENUTUP

A. ANGGARAN

Biaya yang digunakan dalam melakukan erjalanan Delegasi ASGP DPR R adalah sebesar Rp...

B. KETERANGAN LAMPIRAN

Laporan ini dilengkapi oleh Lampiran Dokumentasi Foto

Demikian pokok-pokok laporan Delegasi DPR RI setelah menghadiri Sidang The Association of Secretaries General of Parliaments (ASGP) yang telah berlangsung dari tanggal 24 sampai dengan 26 Maret 2024 di Jenewa Swiss. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Juni 2024
Ketua Delegasi,

Suprihartini, S.IP. M.Si



Lampiran Foto Kegiatan

Diskusi dengan Delegasi Republic of Lao



Diskusi dengan Delegasi Thailand



Lampiran 2

FOTO KEGIATAN



Sekretaris Jenderal the National Assembly of Kingdom of Cambodia ketika meminta dukungan Deputi Persidangan untuk pencalonan dirinya sebagai anggota Komite Eksekutif



Ketua Delegasi ASGP Setjen DPR RI berdiskusi ringan dengan delegasi negara lain



President ASGP, Najib El-Khaldi



Wakil Sekjen Parlemen German, Dr. Silke Albin



Sekjen Parlemen Luxemburg, Laurent Scheeck



Badan Kerja Sama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Gedung Nusantara III, Lantai 6, Komplek
MPR/ DPR/ DPD RI
Jln. Jenderal Gatot Subroto, Senayan,
Jakarta



[ksap@dpr.go.id](https://www.instagram.com/ksap@dpr.go.id)



biro_ksap@dpr.go.id



ksap.dpr.go.id



[BKSAP DPRRI](https://www.youtube.com/BKSAP DPRRI)